# BAB II

# HUBUNGAN KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-LAOS

## A. Gambaran Umum Laos

## 1. Sejarah Singkat Laos

Pada pertengahan abad ke-14, Pangeran Chao Fa Ngum berhasil menguasai mayoritas wilayah Laos yang berpusat di Luang Prabang dan menamakan kerajaannya "Lane Xang Hom Khao". Setelah mengalami kemunduran yang cukup lama, kerajaan Lane Xang mulai mengalami kejayaan kembali dibawah pimpinan Raja Setthatirath. Raja Setthathirat kemudian memindahkan istana dari Luang Prabang ke Viang Chan (Vientiane), serta membangun pusat-pusat agama Buddha seperti That Luang Stupa dan Vat Phra Ke,o. Abad ke-15 merupakan masa keemasan Lan Xang di bawah pimpinan Raja Suriya Vongsa. Pada masa itu terjadi interaksi pertama dengan Eropa melalui kedatangan Gerrit van Wuysthoff (*Dutch East India Compan*y) yang meminta izin membuka jalur perdagangan di Sungai Mekong. Memasuki abad ke-17 kekuasaan kerajaan Lane Xang mulai meredup. Pada tahun 1779 Lane Xang diinvasi oleh Taksin/Rama I (Siam) dan saat itu lambang kejayaan Lane Xang yaitu Emerald Buddha dirampas.[[1]](#footnote-2)

Tahun 1863 Perancis muncul sebagai kekuatan baru dan melaksanakan ekspedisi ke Luang Prabang di bawah pimpinan Auguste Pavie. Kala itu Pavie menawarkan perlindungan kepada Raja Luang Prabang untuk berada di bawah protektorat Perancis. Pada tahun 1893, di bawah ancaman Perancis, Siam menyerahkan seluruh wilayahnya di timur sungai Mekong yang menjadikan Viang Chan sebagai ibukota koloni Laos di bawah administrasi *French Indochina* di Hanoi. Selama masa perang dunia ke II, Jepang menduduki Koloni Perancis Indocina. Namun kehadiran Jepang tidak bertahan lama sampai tahun 1946, Perancis kembali menduduki Laos. Pada tanggal 19 Juli 1949, Perancis memberikan kemerdekaan kepada Laos, menjadi negara monarki merdeka di dalam Uni Perancis.[[2]](#footnote-3)

Selama perang Indocina pertama, rakyat Laos yang tergabung dalam Partai Komunis Indocina membentuk organisasi Pathet Lao yang mendukung kemerdekaan Laos dan pada tahun 1972 dirubah menjadi Lao People's Revolutionary Party (LPRP). Sejalan dengan kalahnya Perancis oleh komunis Vietnam dan dilaksanakannya konferensi perdamaian di Genewa tahun 1954, akhirnya Laos memperoleh kemerdekaan sepenuhnya dari Perancis. Pemilihan umum pertama kali digelar tahun 1955, dan membentuk koalisi pertama pemerintah yang dipimpin oleh Pangeran Saouvannphouma pada tahun 1957. Koalisi tersebut pecah pada tahun 1958 dibawah tekanan Amerika Serikat. Koalisi pemerintah kembali dibangun oleh Saouvannphouma, namun tidak bertahan lama.

Tahun 1975 perang saudara di Laos berakhir dengan kemenangan LPRP.[[3]](#footnote-4) Pada tanggal 2 Desember 1975, LPRP berhasil menggulingkan pemerintahan monarki dan memproklamirkan berdirinya Republik Demokratik Rakyat Laos (RDR Laos) hingga saat ini.[[4]](#footnote-5)

**2. Kondisi Politik**

Republik Demokratik Rakyat Laos merupakan negara dengan single party State yaitu LPRP, yang berhaluan komunis. LPRP memiliki organisasi sayap yang mengatur kebijakan dan pengendalian seluruh aspek kehidupan di Laos. Pemilihan umum pertama, sejak berkuasanya pemerintah komunis di Laos (1975), dilaksanakan pada tahun 1989. Setelah pemilu disusun konstitusi baru pada tahun 1991 yang disahkan oleh National Assembly (NA) pada tanggal 14 Agustus 1991. Sistem pemerintahan yang dianut adalah Kabinet Parlementer dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Adapun Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh National Assembly (NA) untuk masa bakti 5 tahun, sedangkan Perdana Menteri dan anggota Kabinet ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan NA yang merupakan Majelis tipe Uni-Kameral yang anggotanya dipilih oleh rakyat Laos.[[5]](#footnote-6)

Saat ini pemerintahan dipimpin oleh Presiden Choummaly Sayasone sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri Thongsing Thammavong sebagai Kepala Pemerintahan. Keduanya disahkan pada sidang ke-7 National Assembly (NA) dan telah melaksanakan tugasnya sejak bulan Juli 2011. Stabilitas politik dan keamanan dalam negeri Laos merupakan prioritas utama pemerintahan sekarang ini. Pemilihan umum selanjutnya akan diadakan pada bulan April 2016. Selama 5 tahun belakangan, NA telah memainkan peran penting dalam proses legislasi hingga adopsi terhadap peraturan dan undang-undang, peningkatan pelayanan publik, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan melalui petisi dan dengar pendapat.[[6]](#footnote-7)

Secara politik, Laos relatif stabil. Pemerintahan dan birokrasi sepenuhnya berada di bawah kontrol Politbiro Komite Pusat Partai Revolusioner Rakyat Lao (LPRP). Politbiro merupakan badan tertinggi dari LPRP yang mengadakan pertemuan setidaknya dua kali setahun. Menurut aturan Partai, Politbiro mengarahkan orientasi umum dari kebijakan pemerintah dan memberlakukan hal-hal yang telah disetujui baik oleh Kongres Partai maupun Komite Sentral. Para anggota Politbiro dipilih dan diberi peringkat oleh Komite Sentral berdasarkan dari hasil Kongres Partai. Politbiro saat ini terdiri dari 11 anggota dengan peringkat pertama adalah Presiden Laos dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral, Choummaly Sayasone diikuti oleh Perdaha Menteri, Menteri Luar Negeri, Ketua Parlemen dan wakil Perdana Menteri serta beberapa Menteri terpilih.[[7]](#footnote-8)

Laos tetap mempertahankan sistem sosialisme dengan mengawasi secara ketat aktivitas politik masyarakat Sebagai satu-satunya partai, LPRP mendominasi pemerintahan dan birokrasi. LPRP memiliki kontrol penuh atas organisasi politik yang ada di Laos yakni: Lao Front for National Reconstruction (LFNR), Lao Women's Union (LWU), Lao People's Revolutionary Youth Union (LPRYU) dan Lao Federation ofTrade Unions (LFTU).[[8]](#footnote-9)

Dalam hubungan kerja sama luar negeri, Laos terus membuka diri dan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra pembangunan dan donor. Meski demikian, Laos tetap memprioritaskan hubungan politiknya dengan Vietnam yang merupakan political reference point dan dengan mitra tradisional lainnya seperti RRT, Rusia, Korea Utara. Sampai saat ini Laos telah menjalin hubungan diplomatik dengan 136 negara dan mempunyai perwakilan di 35 negara. Pada tataran internasional, Laos berusaha memperkokoh legitimasi internasionalnya dengan memproyeksikan dirinya sebagai "a small peace loving nation on good term with other countries" dan terus memperkuat hubungannya dengan negara-negara lain. Saat ini Laos tercatat menjadi anggota PBB dan organisasi internasional dan regional seperti : ASEAN, GNB, G-77, FAO, Bank Dunia, ADB, UNESCO, UNODC, ILO, ITU, WHO, WMO, UPU, IMF, 1CA0, FAD, MRC, WTO, dll.[[9]](#footnote-10)

Laos secara resmi bergabung dalam ASEAN pada 23 Juli 1997 dan sejak saat itu turut berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam berbagai forum kerja sama ASEAN dengan menampilkan diri sebagai negara anggota yang bertanggung jawab. Setelah bergabung dengan ASEAN, Laos semakin berkembang dan sejalan dengan hasil positif yang diperoleh, Pemerintah Laos menetapkan target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 dan keluar dari status LDC pada tahun 2020. Agar dapat lebih meningkatkan posturnya di kawasan, Pemerintah Laos mencanangkan visinya untuk menjadi Land-linked Country dan Battery of ASEAN dengan memanfaatkan peran vitalnya sebagai hub bagi pertumbuhan ekonomi di mainland ASEAN. Terkait visi ini, Laos baru saja meresmikan pembangunan railway utara selatan yang menghubungkan Vientiane, ibukota Laos dengan Kunming, propinsi yang berdekatan dengan Yunnan.[[10]](#footnote-11)

**3. Kondisi Ekonomi**

Dari sisi ekonomi, Laos termasuk negara yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Peluncuran kebijakan *New Economic Mechanism* (NEM) pada tahun 1986, membawa Laos memasuki periode konsolidasi nasional dan pembangunan. NEM menjadi titik tolak Laos membuka diri dan berinteraksi dengan masyarakat internasional dengan memprioritaskan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan negara-negara tetangganya. Sejak saat itu. Pemerintah Laos telah melakukan berbagai pembenahan melalui *Governance Reform Programme* yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, supremasi hukum, reformasi birokrasi dan manajemen keuangan nasional. Kebijakan tersebut secara nyata berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Laos. Pada Februari 2013, Laos bergabung dengan *Word Trade Organization* (WTO) dan pemerintahnya akan meneruskan kebijakan integrasi regional maupun internasional.[[11]](#footnote-12)

Keseriusan pemerintah Laos dalam mengembangkan ekonomi nasionalnya terlihat dari target pembangunan ekonomi Laos yang tertuang dalam 8th National Socio-Economic Development Plan (NSEDP) 2016-2020. Dokumen ini merupakan dokumen utama perencanaan pembangunan nasional Laos untuk tahun 2016-2020. Tujuan utama yang tertuang di dalamnya adalah keinginan Laos untuk mengurangi kemiskinan dan keluar dari status *Least Developed Countries* (LDC). Tujuan ini ingin dicapai melalui peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui promosi potensi nasional dan keuntungan komparatif, pemanfaatan dan pengelolaan efektif sumber daya alam serta integrasi nasional yang kuat. Diharapkan tingkat kemiskinan berada pada posisi tidak lebih dari 7% pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi berkisar 7,5%-8% per tahun, GN1 per kapita sebesar 1800 USD pada tahun 2020, defisit anggaran tidak lebih dari 5% dan investasi ditetapkan sebesar 30% dari GDP. Selain itu, NSEDP mencantumkan integrasi global dan regional sebagai salah satu dari 6 (enam) visi pembangunan Laos menuju 2030 dan 5 (lima] tujuan jutamanya. Laos juga ingin untuk menjadi upper-middle income country pada tahun 2030.[[12]](#footnote-13)

Pendapatan per kapita Laos sekitar USD 1700 dengan peningkatan sekitar 11% per tahun. Sumbangan pertumbuhan terbesar didapat dari sektor jasa 38% (grosir dan perdagangan ritel, pariwisata, transportasi dan telekomunikasi] dan sektor industri 39% (tambang, konstruksi, dan agrikultur). Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Laos adalah konsumsi dan investasi, baik domestik maupun asing. Perdagangan internasional Laos mengalami defisit dengan peningkatan tajam pada importasi produk-produk elektronik, namun di lain pihak ekspor semakin menurun karena penurunan kinerja di sektor mineral, pertanian dan metal waste. Tenaga kerja lokal Laos memiliki jumlah yang terbatas sehingga dikhawatirkan tidak dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja di Laos. Selain itu, mayoritas tenaga kerja Laos adalah low-skilled labor. Fresh-graduates di Laos banyak yang mengambil bidang studi yang tidak sesuai dengan permintaan pasar, sehingga jumlah tenaga kerja asing di bidang-bidang pertanian, jasa dan industri semakin meningkat.[[13]](#footnote-14)

Pembangunan jembatan persahabatan yang menghubungkan kota-kota di Laos dengan kota di wilayah negara tetangga, juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Laos« Hingga saat ini, telah di bangun 4 buah jembatan persahabatan antara Laos dengan Thailand. Jembatan pertama yang menghubungkan provinsi Vientiane di Laos dan Nong Khai di Thailand di bangun pada tahun 1994, dengan panjang lebih dari 1.100 m. Jembatan itu dibangun dengan bantuan dari Pemerintah Australia. Jembatan kedua menghubungkan provinsi Savanakhet di Laos dengan provinsi Mukadhan di Thailand. Sumber utama dana pembangunan jembatan ini adalah dana pinjaman dari Jepang.[[14]](#footnote-15)

Jembatan yang ketiga adalah jembatan sepanjang 1400 m, yang menghubungkan provinsi Thakhek, Khammouane di Laos dengan provinsi Nakhon Phanom di Thailand. Jembatan tersebut diresmikan pada tahun 2011. Jembatan persahabatan terakhir yang telah dibangun antara Laos dengan Thailand adalah jembatan yang menghubungkan Ban Houayxay di Laos dan distrik Chiang Khong di Thailand. Jembatan sepanjang 630 m tersebut mulai beroperasi pada tahun 2013. Sumber dananya adalah pembiayaan gabungan pemerintah Laos, Thailand, RRT dan ADB.[[15]](#footnote-16)

Selain dengan Thailand, saat ini telah di bangun jembatan persahabatan Laos-Myanmar. Pembangunan jembatan sepanjang 691 m tersebut telah memasuki tahap akhir dan seharusnya dijadwalkan untuk beroperasi pada pertengahan tahun 2015. Nantinya jembatan itu akan menghubungkan provinsi Luang Namtha di Laos dan distrik Thakhelek di Myanmar.[[16]](#footnote-17)

Untuk menarik investasi domestik dan asing, pemerintah telah membuka pelayanan investasi satu pintu sejak 1 Oktober 2011 dengan tujuan untuk memfasilitasi investasi yang cepat dan transparan. Hingga saat ini terdapat 10 (sepuluh) zona ekonomi khusus di Laos. Beberapa perusahaan telah beroperasi di zona-zona tersebut, antara lain yaitu Savanlo Tourism Service, Nikon Lao, Koyo Parts Cameras, Toyota Bushoku Assembles Vehicles, Essilor Ophthalmic Lenses, Aerowork Airplane Parts, Pasifica Streams Development, Aderans Wig Producers dan King Roman International Group.[[17]](#footnote-18)

**4. Bidang Pertahanan Keamanan**

Letak Laos di kawasan segitiga emas menjadikan wilayah Laos sebagai salah satu jalur lintas utama kejahatan transnasional. Di bidang pertahanan dan keamanan, Laos masih sangat tergantung pada Vietnam. Walaupun kapasitas Angkatan Bersenjata Laos masih sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga di sekitarnya, namun Laos terus berperan aktif dengan membangun mekanisme kerja sama keamanan perbatasan dan kawasan khusus untuk menanggulangi kejahatan transnational seperti penyelundupan narkotika, perdagangan manusia dan penyelundupan senjata. Khusus masalah narkotika, Pemerintah Laos bekerja sama dengan *United Nations Office for Drug and Crimes* (UNODC) telah meluncurkan sejumlah proyek peningkatan kapasitas penegak hukum, pengawasan daerah perbatasan, penyuluhan. Sementara itu program Crop Substitution dengan mendorong rakyat untuk beralih dari tanaman opium ke tanaman produktif seperti karet dan kopi masih belum sepenuhnya berhasil karena penduduk tetap tergoda untuk tetap menanam opium yang dapat menghasilkan uang secara cepat dan mudah.[[18]](#footnote-19)

Selain narkotika, perdagangan manusia dan penyelundupan senjata, kelompok pemantau perdagangan internasional menyatakan bahwa Laos telah dikaitkan dengan beberapa transaksi perdagangan ilegal satwa liar bernilai tinggi. *Traffic*, sebuah organisasi non-pemerintah berbasis di Inggris yang melacak perdagangan satwa liar di Asia, memberikan peringatan kepada otoritas bandara di Laos untuk memperketat pengawasan terhadap kegiatan ini. Peringatan tersebut dibuat menyusul insiden penyitaan bayi 170 bayi *Radiated Tortoises* yang dibungkus pita dan tersembunyi dalam kompartemen rahasia peti perjalanan ke Laos melalui Paris.[[19]](#footnote-20)

Kelompok ini menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Laos telah terlibat sebagai sumber, transit atau negara tujuan dari setidaknya sembilan transaksi satwa liar bernilai tinggi pada tahun 2014. Pemerintah Laos diminta untuk meningkatkan kewaspadaan di Bandara Internasional Wattay di ibukota Vientiane dan titik internasional lainnya sebagai jalur masuk dan keluar perdagangan satwa liar. Laos juga diidentifikasi sebagai sumber utama produk satwa liar seperti beruang empedu. Tidak hanya kejahatan transnasional, Laos juga masih berhadapan dengan masalah keamanan yang melibatkan warga negaranya sendiri. Saat ini tercatat 37% wilayah Laos terkontaminasi UX0 (Unexploded Ordnance) dan telah banyak menimbulkan korban di kalangan penduduk sipil. Pada periode 1964-1973 (perang Indocina), AS menjatuhkan 2.4 juta ton bom dan cluster munitions (setara dengan satu misi pemboman setiap delapan menit, 24 jam sehari, selama sembilan tahun) dimana 30% diantaranya gagal meledak. Di sejumlah daerah seperti Xiengkhouang dan Savannakhet, masih banyak terdapat UXO. Dengan bantuan negara-negara/lembaga donor, Pemerintah Laos pada tahun 2012 berhasil menghancurkan 20,142 items UXO dan membersihkan 2.318 ha lahan. Bahkan, untuk mempercepat pembersihan UX0 tersebut, pada High Level Round Table Meeting bulan Oktober 2014, pemusnahan UXO telah diterima PBB sebagai MDG ke-9 Laos.[[20]](#footnote-21)

**5. Bidang Sosial Budaya**

Dalam rangka rekonsiliasi nasional, Laos membuka diri dengan menerima kembali ekspatriat Laos yang tinggal di luar negeri termasuk etnis Hmong untuk kembali dan bermukim di Laos. Para ekspat tersebut merupakan warga Laos yang melarikan diri ke luar negeri sejak digulingkannya pemerintahan monarki Laos. Sambutan dan perlakuan yang baik dari pemerintah Laos terhadap mereka secara signifikan telah berhasil meredam suara-suara negatif mengenai situasi HAM di Laos yang selama ini disuarakan para penggiat HAM internasional. Selain HAM, saat ini pemerintah Laos juga mendapat sorotan dalam hal pembangunan hydro power. Demi kelangsungan keamanan energi di kawasan, Laos berkomitmen membangun pembangkit-pembangkit listrik baru dan fasilitas transmisi dan perluasan kerja sama sektor energi sebagai pondasi terbentuknya sub regional power and energy market. Pada awal tahun 2014, Pemerintah Laos membangun bendungan (Dam) di aliran Sungai Mekong di Propinsi Xayaboury yang mendapat protes dari sejumlah pihak, terutama negara Thailand dan Vietnam, serta aktivis lingkungan hidup. Pembangunan ini dinilai dapat merusak lingkungan dan keragaman hayati yang terdapat di delta Mekong yang dihuni sekitar 20 juta jiwa yang kehidupan dan mata pencahariannya tergantung pada Sungai Mekong.[[21]](#footnote-22)

Dalam hal sosial, Pemerintah Laos menetapkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai sektor prioritas. Terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan di Laos menyebabkan sebagian besar masyarakat Laos dan para pekerja asing di Laos harus pergi ke Thailand untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Peningkatan respon dan akses terhadap fasilitas kesehatan serta peningkatan kualitas telah dirangkum dalam kerangka reformasi kesehatan dan dibentuknya suatu komisi khusus (National Commission for Health Reform).[[22]](#footnote-23)

Terkait pendidikan, tenaga pengajar yang berkualitas masih cukup rendah. Laos banyak menerima bantuan peningkatan kapasitas dari negara-negara maju dan berkembang terkait kedua hal ini. Pemerintah Laos memberi perhatian besar pada peningkatan kualitas SDMnya dengan memanfaatkan tawaran bantuan beasiswa pendidikan dari negara-negara sahabat dan lembaga donor. Saat ini sejumlah pejabat dan mahasiswa Laos tengah menempuh pendidikan lanjutan, baik pada tingkat S-l, S-2 dan S-3 di sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand, RRT, Rusia, Australia, Perancis, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Singapura, Malaysia dll. Saat ini pemerintah Laos telah menetapkan peningkatan budget hingga 11-15 % untuk pengembangan infrastruktur pendidikan dan pengajaran mulai dari tingkat pendidikan usia dini hingga universitas. Guna memenuhi permintaan terhadap tenaga kerja ahli, peningkatan sekolah kejuruan juga menjadi target pemerintah.[[23]](#footnote-24)

Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, jumlah populasi di Laos tergolong sedikit Per tanggal 1 Maret 2015 jumlah total populasi Laos sebesar 6.492.400 jiwa. Hal ini menunjukkan peningkatan sekitar 1,45% per tahunnya. Provinsi dengan jumlah populasi terbesar adalah Savannakhet (15%), Vientiane Capital (13%) dan Champassack (11%). Sedangkan provinsi dengan jumlah populasi terkecil adalah Xaysombon dan Sekong yang jumlah populasinya masing-masing hanya kurang dari 2% total populasi Laos. Jumlah populasi pria sedikit lebih banyak dari jumlah populasi wanita (101 pria setiap 100 wanita). Rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Laos adalah 27 jiwa per km2 dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Vientiane Capital (209 jiwa per km2), diikuti oleh provinsi Savanakhet dan Champasack. 33% dari total populasi Laos tinggal di daerah perkotaan.[[24]](#footnote-25)

Tingkat kesenjangan yang tinggi diantara berbagai provinsi yang ada di Laos masih cukup tinggi. Tingkat kesenjangan ini berkaitan dengan laju pembangunan. Provinsi Vientiane Capital merupakan provinsi yang paling maju, sedangkan provinsi Phongsaly merupakan yang paling terbelakang. Pemerintah Laos dengan bantuan negara- negara yang tergabung dalam Development Partners (DPs), terus berusaha untuk memperkecil kesenjangan tersebut dengan mengembangkan kemampuan masyarakat setempat untuk memajukan daerahnya masing - masing. Pada November 2015, Laos dan DPs menandatangani Vientiane Declaration on Partnership for Effective Development Cooperation (VD II). Deklarasi ini merupakan tahapan lanjutan dari bantuan yang diberikan oleh DPs dengan perubahan paradigma yang sebelumnya adalah pemberian bantuan menjadi kerja sama pembangunan yang efektif.[[25]](#footnote-26)

## 2. Laos Dalam Kancah Internasional

Negara Laos memiliki peran di dunia internasional dan memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara di seluruh dunia. Negara Laos tergabung dalam beberapa organisasi di dunia yakni anggota dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan LLCDs (*Landlock Developing Countries*). Keanggotaan Laos dalam organisasi tersebut bukan hanya sebagai negara peserta tetapi Laos berperan sebagai negara tuan rumah (*Host Country*) dalam gelaran maupun pertemuan puncak organisasi tersebut.

[Laos](https://id.wikipedia.org/wiki/Laos) secara resmi bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1955.[[26]](#footnote-27)Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah [organisasi internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_internasional) yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti [Liga Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Liga_Bangsa-Bangsa) dan didirikan setelah [Perang Dunia II](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II) untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota dan saat ini terdapat 193 anggota.[[27]](#footnote-28)

Pada tanggal [23 Juli](https://id.wikipedia.org/wiki/23_Juli) [1997](https://id.wikipedia.org/wiki/1997) negara Laos secara resmi juga bergabung dengan ASEAN bersamaan dengan bergabungnya negara Myanmar.[[28]](#footnote-29) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau lebih populer dengan sebutan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan [pertumbuhan ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi), kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai.[[29]](#footnote-30)

Laos merupakan anggota dari Negara Berkembang Terkurung Daratan (*Landlocked developing countries*) atau LLDCs yakni merupakan [negara berkembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang) yang [terkurung daratan](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_terkurung_daratan). Kerugian ekonomi yang dialami oleh negara seperti ini membuat mayoritas negara terkurung daratan tergolong [negara kurang berkembang](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Negara_kurang_berkembang&action=edit&redlink=1) (*least developed countries*; LDC). Para penduduk negara ini menempati porsi terbawah dalam tingkatan kekayaan penduduk dunia. Kecuali Eropa, tidak ada satu pun negara terkurung daratan yang maju bila diukur dengan [Indeks Pembangunan Manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia) (*Human Development Index*). Sembilan dari dua belas negara dengan skor HDI terendah terkurung daratan. Biaya perdagangan di negara terkurung daratan yang bergantung pada perdagangan laut naik dua kali lipat dibandingkan negara tetangganya yang punya akses ke laut. Negara terkurung daratan mengalami pertumbuhan ekonomi 6% lebih sedikit daripada negara yang tidak terkurung daratan.[[30]](#footnote-31)

Pada tanggal 13 Maret 2013, Perwakilan PBB dan pejabat pemerintah senior dari LLDCs (*Landlock Developing Countries*) di Eropa, Asia dan Pasifik [bertemu](http://www.unescap.org/news/much-progress-made-landlocked-developing-countries-last-decade-agenda-unfinished) di Vientiane, Laos, untuk membahas bagaimana untuk berpartisipasi penuh dalam perdagangan global dan mengatasi isolasi dari pasar dunia dan sosial lainnya yakni konsekuensi secara ekonomi karena tidak memiliki akses langsung ke laut.[[31]](#footnote-32) Pada tanggal 6 September 2016 Puncak KTT ASEAN ke-28 dan ke-29 dibuka secara resmi di National Convention Center, Vientiane dengan kehadiran ASEAN Kepala Negara/Pemerintahan, Menteri Luar Negeri ASEAN, Menteri terkait, Sekretaris Jenderal ASEAN, tamu undangan, Delegasi serta media lokal dan asing.[[32]](#footnote-33)

## 3. Hubungan Laos dan ASEAN

Pada tanggal [23 Juli](https://id.wikipedia.org/wiki/23_Juli) [1997](https://id.wikipedia.org/wiki/1997) Laos secara resmi juga bergabung dengan ASEAN bersama dengan Myanmar.[[33]](#footnote-34) Melalui kebijakan New Economic Mechanism(NEM) tahun 1986, Laos mulai membuka diri dan berinteraksi dengan masyarakat internasional dengan melakukan berbagai pembenahan. Kebijakan tersebut secara nyata berhasil menarik investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Sejalan dengan kemajuan ekonomi, pemerintah Laos menargetkan keluar dari status least developed countries/LDC (Negara terbelakang) pada tahun 2020. Untuk lebih meningkatkan posturnya di kawasan, Pemerintah Laos mencanangkan visinya menjadi Land-linked Countrydan Battery of ASEANdengan memanfaatkan peran vitalnya sebagai hub bagi pertumbuhan ekonomi di mainland ASEAN. Selain anggota AS EAN, Laos menjadi anggota pada sejumlah organisasi internasional seperti PBB dan badan-badan khususnya, GNB, G-77, Great Mekong Sub Region(GMS), AS EM dan pada awal 2013 telah diterima menjadi anggota WTO.[[34]](#footnote-35)

Di bidang ekonomi, dalam tiga tahun terakhir perekonomian Laos tumbuh rata-rata 8.1% dan income per capita US$. 1349 (2012). Nilai perdagangan Laos tahun 2012 mencapai US$. 11.1 miliar yang terdiri dari ekspor US$ 4.6 miliar dan impor US$ 6.56 miliar. Komoditi ekspor utama Laos adalah pertambangan, produk pertanian, kayu dan produk kayu, pakaian jadi dengan tujuan utama Thailand, RRT , dan Vietnam. Sedangkan impor umumnya dari Thailand, RRT , Vietnam, dan Jepang berupa bahan bakar, makanan, barang konsumsi, mesin, kendaraan dan suku cadang.[[35]](#footnote-36)

Perdagangan dengan negara-negara ASEAN umumnya didominasi Thailand dan Vietnam. Dalam National Social-Economic Development Plan (NSEDP) ke-7 periode 2011-2015, Pemerintah Laos menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8%. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dana sebesar US$ 15.81 miliar yang sumbernya didapatkan dari 12% anggaran pemerintah, 26% Official Development Assistance(ODA ) dan 56% investasi asing (FDI ).[[36]](#footnote-37)

### Laos menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN sebanyak dua kali, yakni *pertama* pada tanggal 29-30 November 2004 KTT ASEAN di ibukota Laos, Vientianne membahasa tema utama pembentukan zone perdagangan bebas. Untuk mempercepat prosesnya, ke 10 negara ASEAN menyepakati dipercepatnya penghapusan pajak dan bea dalam cabang industri terpenting, antara lain di bidang otomotif, textil dan produk elektronik. Juga dirundingkan penghapusan seluruh bea impor antara negara ASEAN dan China.[[37]](#footnote-38) *Kedua* pada tanggal 6 September 2016 Puncak KTT ASEAN ke-28 dan ke-29 dibuka secara resmi di National Convention Center, Vientiane dengan kehadiran ASEAN Kepala Negara/Pemerintahan, Menteri Luar Negeri ASEAN, Menteri terkait, Sekretaris Jenderal ASEAN, tamu undangan, Delegasi serta media lokal dan asing.[[38]](#footnote-39)

## 4. Hubungan Laos dan Negara CLMV

Dalam perkembangannya, ASEAN memiliki keanggotaan baru yang bergabung setelah organisasi regional tersebut sudah terbentuk selama 30 tahun, negara-negara yang baru bergabung itu adalah negara-negara di kawasan indochina yang merupakan kawasan yang dikuasai oleh negara komunis. Negara baru tersebut adalah Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau yang dikenal dalam terminologi bahasa inggris sebagai CLMV (Cambodia, Loas, Myanmar, Laos, dan Vietnam). Selain adanya perbedaan jarak waktu bergabung dengan negara anggota ASEAN lainnya, negara-negara CLMV ini juga memiliki perbedaan dari segi tingkat pertumbuhan ekonomi dengan negara anggota ASEAN lainnya yang cukup lebar.[[39]](#footnote-40)

Negara-negara CLMV ini memiliki berbagai sejumlah kesamaan dalam keadaan perekonomian negara mereka, meskipun mereka berbeda dalam ukuran pasar mereka dan prioritas ekonomi.[[40]](#footnote-41) Pendapatan per kapita dari masing-masing negara yang rendah, dan sumber daya manusia yang terbatas. Kesamaan CLMV meliputi terutama agro berbasis ekonomi transisi mereka, tinggi tingkat kejadian kemiskinan, infrastruktur yang tidak memadai, dan lembaga-lembaga yang masih terlalu lemah untuk beralih kedalam ekonomi pasar apabila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya.[[41]](#footnote-42)

CLMV, memiliki sejumlah kesamaan, meskipun berbeda dalam ukuran pasar dan prioritas ekonomi. Kesamaan CLMV meliputi terutama agro berbasis ekonomi transisi mereka, tingkat kemiskinan yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, dan lembaga-lembaga yang masih terlalu lemah untuk beralih ke ekonomi pasar. Meskipun CLMV telah menikmati tingkat tertentu stabilitas makroekonomi dalam beberapa tahun terakhir tetapi tingkat pengangguran masih bertahan. CLMV masih menghadapi tantangan besar dalam memerangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan kekayaan antara populasi, dan mengatasi kesenjangan pembangunan di dalam daerah. Meskipun masing-masing negara di CLMV menghadapi kendala pengembangan yang berbeda, CLMV secara keseluruhan memiliki potensi besar untuk pengembangan ke depan, yang akan tergantung pada individu upaya negara dan dukungan dari mitra pembangunan di dalam dan luar daerah.[[42]](#footnote-43)

## 5. Hubungan Indonesia dan Negara CLMV

## 5.1. Kerjasama Bilateral Indonesia dan Kamboja

Indonesia dan Kamboja telah lama menjalin hubungan yang akrab. Kedua negara Indonesia dan Kamboja telah bersahabat dan bersejarah menjalin hubungan sosial budaya sejak abad ke-9 dan ke-10 pada masa Dinasti Syailendra berkuasa pada jaman Kerajaan Mataram di Jawa dan Dinasti Jayawarman II pada masa Kerajaan Angkor di Kamboja. Candi Borobudur di Jawa yang selesai dibangun pada awal abad ke-9 sering dianggap mempunyai pertalian budaya dengan Candi Angkor Wat yang dibangun pada abad ke-12. Presiden RI Soekarno pertama kali bertemu Pangeran Norodom Sihanouk pada saat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Pada bulan Maret 1962, Indonesia mengirim Mayor Jenderal (Purn) Abdul Karim Rasyid sebagai Duta Besar RI Pertama untuk Kamboja.[[43]](#footnote-44)

Hubungan  diplomatik Indonesia dengan Kamboja telah dijalin sejak tahun 1957. Kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1959. Sementara itu, kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Kamboja telah dirintis sejak tahun 1970-an dan telah secara sangat signifikan meningkatkan citra TNI di Kamboja. Hubungan baik kedua Negara tercermin antara lain dari saling kunjung pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan, Pejabat Tinggi Negara dan Parlemen dalam rangka bilateral maupun menghadiri sidang regional seperti sidang-sidang ASEAN. Selain mekanisme saling kunjung, terdapat Komisi RI-Kamboja yang dibentuk pada tanggal 18 Februari 1997.[[44]](#footnote-45)

         Indonesia berperan besar pada proses rekonsiliasi perdamaian Kamboja melalui *Jakarta Informal Meeting I*(1988), *Jakarta Informal Meeting II* (1989), *Informal Meeting on Cambodia* I dan II (1990), *Preparatory Meeting for the International Conference on Cambodia* (1990) dan sebagai *co-chair meeting* bersama Perancis pada *Paris International Conference on Cambodia* (1991). Indonesia telah pula memainkan peran yang cukup khusus dalam hal mendorong dan mendukung Keketuaan Kamboja di ASEAN tahun 2012. Untuk mencapai posisi bersama dalam penanganan isu Laut China Selatan secara damai, pada saat Keketuaan Kamboja di ASEAN tahun 2012, Menlu RI Marty Natalegawa melakukan upaya “*shuttle diplomacy*” dengan berkunjung ke sejumlah negara ASEAN pada tanggal 19-20 Juli 2012. Dari upaya tersebut ASEAN berhasil mencapai konsensus mengenai *ASEAN's six-point principles on the South China Sea*. Pernyataan mengenai konsensus tersebut telah dikeluarkan oleh Menlu Kamboja, Hor Namhong sebagai Ketua ASEAN 2012 pada tanggal 20 Juli 2012.[[45]](#footnote-46)

Atas upaya Indonesia dalam menangani penyelesaian isu Laut China Selatan,Perdana Menteri Hun Sen telah mengirimkan surat kepada Presiden RI yang menyambut gembira upaya Indonesia yang berhasil mengharmonisasikan posisi ASEAN atas isu Laut China Selatan. Selain itu, sebagai Ketua ASEAN 2012, PM Kamboja juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI yang telah menugaskan Menlu RI untuk mengupayakan konsultasi secara intensif guna mencapai kesatuan dan sentralitas ASEAN.[[46]](#footnote-47)

Hubungan ekonomi Indonesia-Kamboja saat ini lebih didominasi perdagangan luar negeri, dengan neraca perdagangan Indonesia-Kamboja selama 5 tahun terakhir selalu menunjukkan surplus untuk Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik pada tahun 2010, Kamboja merupakan pasar alternative potensial bagi produk Indonesia khususnya mengingat sektor industry riil Kamboja belum mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan sehari-hari 14,5 juta penduduknya maupun perkembangan sektor prioritas mereka seperti garment, pariwisata dan konstruksi. Rata-rata ekspor Indonesia mencapai kenaikan di atas 10% dalam periode 5 tahun ini. Ekspor Indonesia ke Kamboja tahun 2011 mencapai US$ 259,5 juta (kenaikan sebesar 19%) dan impor Indonesia dari Kamboja mencapai US$ 7,95 juta (data BPS).[[47]](#footnote-48)

Beberapa produk Indonesia yang cukup populer di Kamboja adalah produk-produk *consumer goods* dan farmasi. Beberapa perusahaan farmasi indonesia seperti *Dexa Medica, Sanbe* dan Kalbe Farma, Sanbe Farma dan juga Indo Farma telah menjajaki pasar Kamboja. Produk farmasi Indonesia saat ini dikenal masyarakat Kamboja sebagai produk tingkat menengah dan dipercaya cukup luas oleh masyarakat. Selain produk farmasi, produk Indonesia yang cukup berhasil di Kamboja adalah produk makanan dan minuman dalam kemasan, dengan merek dagang seperti Milkita, Kopiko dan Nutri C cukup popular di pasar Kamboja.[[48]](#footnote-49)

Guna meningkatkan penetrasi produk Indonesia di Kamboja, setiap tahunnya telah didorong keikutsertaan pengusaha Kamboja dalam berbagai forum pameran di Indonesia, misalnya pada tahun 2012 direncanakan akan terdapat 10 orang pengusaha Kamboja yang akan menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) 2012. Selain itu, juga difasilitasi kehadiran pengusaha Indonesia untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan di Kamboja, baik berupa solo exhibition seperti *Indonesian Trade and Tourism Promotion* (ITTP) ataupun berbagai pameran yang diselenggarakan oleh Kamboja seperti dalam pelaksanaan *ASEAN Garment and Textiles* 2012.[[49]](#footnote-50)

Memandang potensi produksi beras Kamboja, pada tanggal 28 Agustus 2012, Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan kamboja telah menandatangani MOU Perdagangan Beras RI-Kamboja yang mengatur mengenai pengadaan cadangan beras bagi Indonesia sampai dengan 100.000 ton per-tahun jika dibutuhkan. MOU yang ditandatangani oleh kedua menteri tersebut akan menjadi payung bagi perdagangan beras kedua Negara dan akan memberikan landasan bagi BULOG sebagai institusi pengadaan beras di Indonesia untuk dapat menjadikan Kamboja sebagai alternatif sumber pengadaan cadangan beras bagi Indonesia selain Vietnam, Thailand dan India.[[50]](#footnote-51)

Kementerian pertanian kedua negara saat ini juga tengah dalam proses untuk membentuk kerjasama pertanian yang salah satunya juga akan memfasilitasi kerjasama perberasan antara Indonesia-Kamboja yang meliputi kerjasama research and development serta promosi produk pertanian dan pendukungnya. Selain memanfaatkan Kamboja sebagai alternatif pengadaan beras, pada tahun 2012, pengusaha Indonesia telah berusaha untuk memanfatkaan perkembangan sektor pertanian Kamboja dengan menjual produk input pertanian seperti pupuk dan mesin pertanian. Salah satu perusahaan Indonesia dengan menilik keterbatasan fasilitas paska panen Kamboja tengah memfinalisasi proses investasi *rice mill* di Kamboja.[[51]](#footnote-52)

Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan *Sister Temple Province* antara Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Siem Reap, yang ditandatangi pada bulan Juni tahun 2007 dan *Action Plan* yang ditandatangani pada bulan Juni 2012, terdapat kesepakatan-kesepakatan kerjasama antara beberapa lembaga dan sekolah di Jawa Tengah dengan lembaga dan sekolah di Siem Reap yaitu :

·          Penandatanganan Nota Kesepahaman di bidang Kerjasama Pendidikan Tahun 2012-2017 antara Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Departemen Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Siem Reap pada tanggal 13 Maret 2012. Penandatanganan *Sister School Agreement* antara SMA Taruna Nusantara Magelang dengan *Hun Sen Siem Reap High School* pada 21 Juli 2011 dan SMPN 1 Kudus dengan *10 January High School*, Siem Reap pada tanggal 14 Maret 2012. Penandatanganan *Record of Discussion* antara SMPN 1 Purbalingga dengan *Preash Emkosa Secondary School* pada tanggal 21 Juli 2011 dan ditandatanganinya *Minutes of Discussion* antara SMPN 1 Kalimanah Purbalingga dengan *Samdech Euv High School Siem Reap* pada tanggal 23 April 2012.[[52]](#footnote-53)

Jumlah WNI di Kamboja (terdaftar) per September 2012 sebanyak 722 orang yang tersebar di beberapa kota dan propinsi di Kamboja. Konsentrasi WNI terbanyak berada di Phnom Penh (sekitar 330 orang). WNI di Kamboja pada umumnya adalah *skilled workers* yang bekerja di berbagai bidang, seperti di bidang organisasi internasional, LSM, perhotelan, perusahaan (property, telekomunikasi, obat), wiraswasta (restoran), Hotel dan Kasino, Missionaris, pengajar, dll.[[53]](#footnote-54)

Kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Kamboja telah dirintis sejak tahun 1970-an. Pejabat Athan Kamboja di Indonesia ditempatkan untuk pertama kalinya pada 7 Januari 2007 dan ditandatanganinya *MoU between the Indonesian National Army and the Army of the Royal Cambodian Armed Forces (RCAF) on Army-to-Army talk* di Kamboja pada Desember 2007. TNI secara berkesinambungan telah memberikan bantuan Pelatihan kepada Royal Cambodian Armed Forces (RCAF), khususnya Brigade 911 dan Pasukan Pengamanan Perdana Menteri (Paspam PM), dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Kerjasama Pelatihan antara Paspampres RI dan Paspam PM Kamboja telah berlangsung sejak tahun 2005. Dalam waktu 7 tahun Paspampres RI telah mengirim 53 pelatih dalam 10 dari 17 gelombang yang sudah dilaksanakan. 3000-an Paspam PM telah dididik menjadi professional dalam bidangnya. Misi utama Pelatihan adalah peningkatan kualitas SDM dan professionalisme para prajurit Paspam PM Kamboja. Komitmen RI, dalam hal ini TNI, terus memelihara dan meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan.[[54]](#footnote-55)

## 5.2. Kerjasama Bilateral Indonesia Laos

Hubungan diplomatik RI-Laos pertama kali dibuka pada 1957, dengan kantor yang dioperasikan dari Bangkok. Pada 1962 hubungan kedua negara ditingkatkan pada level kedutaaan, dan pada 1965, Kedutaan Republik Indonesia resmi dibuka di  Vientiane, Laos. Semenjak saat itu, Pemerintah RI dan Laos dapat menjaga dan mengembangkan hubungan politik kedua negara. Pada 2007, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Lao telah memperingati 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara, dengan menyelenggarakan suatu seminar yang berjudul “50 Tahun Hubungan RI-Laos”, yang diselenggarakan di Indonesia.[[55]](#footnote-56)

Indonesia, Laos  dan negara ASEAN lainnya (Kamboja, Mynmar, dan Vietnam) memiliki kesamaan nilai-nilai budaya dalam Budha. Indonesia bersama empat negara ASEAN tersebut telah menandatangani Deklarasi Borobudur, yang telah menghasilkan “*Trail of Civilization of Buddhism in Performing Arts*”.  Selama tiga tahun terakhir Indonesia menjadi tuan rumah untuk “*Trail of Civilization of Buddhism in Performing Arts*”, yang diselenggarakan di Candi Borobudur. Penyelenggaraan “*Trail of Civilization of Buddhism in Performing Arts*” tahun 2009, juga diselenggarakan di Indonesia, di Candi Borobudur, dengan tema “*Tilakhana*”.[[56]](#footnote-57)

Pemerintah Indonesia akan tetap memberikan bantun kepada Pemerintah Laos dalam bidang *“capacity building”.* Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk mengembangkan kerjasama dengan Laos, dengan memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan kepada pelajar dan pejabat Laos yang berkeinginan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia.  Pemerintah Indonesia berharap agar hubungan bilateral dengan Pemerintah Laos dapat lebih ditingkatkan melalui pendekatan hubungan ‘people-to-people’.[[57]](#footnote-58)

Hubungan politik yang erat antara Pemerintah RI-Laos sangat terlihat dari kegiatan saling kunjung antara pejabat negara, seperti:

1. Kunjungan Perdana Menteri Laos, Mr. Bouasone Bophavanh ke Indonesia pada Januari tahun 2007.

2. Kunjungan Menteri Pendidikan Nasional Laos, Dr. Somkath Mangnomek ke Indonesia pada tahun  Maret 2007.

3. Kunjungan Wakil Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan Laos, Letnan Jendral Ay Soulisyseng, pada Maret 2007.

4. Kunjungan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri, Dr. Thongloun Sisoulith Laos pada Juli 2007.

5. Kunjungan Menteri Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Bambang Soedibyo ke Laos pada Juli 2007.

6. Kunjungan Menteri Pariwisata Laos, Mr. Somphong Mongkhovilay ke Indonesia pada Agustus 2007.

7. Kunjungan Presiden Majelis Bangsa Laos, Mr. Thongsing Thammavong pada Agustus 2007.

8. Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia, Bapak Hassan Wirajuda ke Laos, pada Desember 2007.

Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia ke Laos pada Juli 2006.

9. Kunjungan Menteri Pertanian RI, Dr. Anton Apriyantono, Dalam Rangka Kerjasama Pertanian RI – Laos, April 2009.

10. Kunjungan Menteri Pariwisata Laos, Mr. Somphong Mongkhovilay ke Indonesia, pada Mei 2009, dalam rangka ‘Trail of Civilzation’.[[58]](#footnote-59)

Universitas Gajah Mada (UGM) Indonesia dan Universitas Nasional Laos telah menyepakati penandatanganan kerjasama pendidikan. Disamping itu, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Jepang (JICA), ‘NAM Centre’ dan Departemen Pendidikan Nasinal Indonesia, juga memberikan beberapa pelatihan dan batuan pendidikan, seperti:

1. Darmasiswa RI,  beasiswa jangka panjang dan jangka pendek berlangsung pada tahun 2009-2010.

2. Darmasiswa RI, beasiswa tingkat magister, tahun 2009-2010. (sedang berjalan)

Pelatihan Ukir Kayu tingkat Lanjutan untuk pengrajin Laos, 28 Januari-28 Pebruari 2009.

3. "*International Training Workshop on Development of Renewable Energy; Micro Hydro Energy End-Use Productivity for Rural Economic Development*, 2-9 Juni 2009, Bandung-Indonesia.

4. *“Training Course on Geo-Information for Natural Hazard and Disaster Risk Reduction”*,  8 Juni -27 Juli 2009, Bogor dan Cibinong-Indonesia.

5. *“TCTP on Local Government Support and Intersectoral Colaboration in Mother & Child Health Program through Mother and Child Handbook”*, Padang 29, Juni-6 Juli 2009.

6. “*TCTP on capacity building for poverty Reduction*”, 8-19 Juni 2009 (selesai),

*“International Workshop on Disaster Risk Management for Asia Pacific Countries Consultative Expert Meeting*, Jakarta 9-11 Juni 2009”.

7. Pelatihan Bahasa Indonesia untuk masyarakat Laos yang diadakan setiap tahun di KBRI . Pelatihan bahaha tersebut dibagi dalam 2 level: pemula dan tingkat mahir, dimulai pada bulan Agustus 2009 setiap hari Selasa-Kamis pukul 16.30-18.00.[[59]](#footnote-60)

## 5.3. Kerjasama Bilateral Indonesia Myanmar

Indonesia dan Myanmar adalah dua negara bertetangga yang terletak di Asia Tenggara. Jarak antara kedua negara adalah kira-kira sekitar 350 mil. Berdasarkan sejarah kemerdekaan mereka dan hubungan emosional, kedua negara memiliki hubungan yang sangat istimewa. Kedua negara memiliki hubungan yang sudah berjalan lama sejak era perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Indonesia berhasil mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945, dan Myanmar merdeka pada tahun 1948. Kedua negara secara resmi membentuk hubungan diplomatik pada tanggal 27 Desember 1949, atau lebih dari satu tahun setelah kemerdekaan Myanmar yang jatuh pada tanggal 4 Januari 1948. Pembentukan hubungan diplomatik antara kedua negara disorot oleh pembukaan "Rumah Indonesia" di Yangon, yang kemudian ditingkatkan menjadi Kedutaan besar Republik Indonesia di April 1950. saat itu, Presiden Soekarno memuji Myanmar sebagai "kawan di berjuang dan memenuhi kemerdekaan sejati".[[60]](#footnote-61)

Sejak itu, kedua negara sudah mulai kerjasama di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Indonesia telah dianggap Myanmar sebagai mitra independen berjuang, yang ditunjukkan oleh Perjanjian Persahabatan ditandatangani pada tahun 1951. Perjanjian itu kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada 2 Oktober 1952, melalui Undang-Undang No.18 / 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Uni Burma. Hubungan diplomatik antara kedua negara telah mencapai tahun ke-60 pada 27 Desember 2009. Sepanjang tahun ini, hubungan antara Myanmar dan Indonesia telah didasarkan pada saling pengertian, saling menghormati dan saling mendukung seperti terbukti di forum regional dan internasional.[[61]](#footnote-62)

Secara politis, Myanmar telah menjadi pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947, Myanmar, kemudian di bawah pemerintahan transisi, meminta Pemerintah India untuk mengadakan Konferensi Luar Indonesia di New Delhi. Pada 23 Maret s.d 2 April 1947, India diadakan Asian Relations Conference di New Delhi, India, di mana Myanmar, masih di bawah kekuasaan kolonial Inggris, menunjukkan dukungannya dengan mengutuk agresi militer Belanda.[[62]](#footnote-63)

Bukti lain dari dukungan Myanmar perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah ketika Myanmar diperbolehkan Indonesia Dakota RI-001 "Seulawah" pesawat, yang disumbangkan oleh rakyat Aceh, untuk mendarat di kemudian disebut Rangoon Mingalodon Bandara pada tanggal 26 Januari 1949 dan telah disewa oleh Union of Burma Airways. Pesawat itu diterbangkan dari Calcutta, India, dan dapat tanah di setiap bandara di Jawa dan Sumatera karena pemboman Belanda. peristiwa bersejarah ini telah dikenang sebagai kelahiran Garuda Indonesia Airways. Sementara itu, salah satu pesawat Garuda Indonesia Airways RI-007, sekarang duduk di Museum Angkatan Bersenjata di Yangon, Myanmar.[[63]](#footnote-64)

Hubungan antara Indonesia dan Myanmar masih baik-terikat, ditandai dengan pertukaran kunjungan oleh pemimpin kedua negara.Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Myanmar pada 26 November 1972 pada 22-29 Agustus 1974, dan pada 23-25 ​​Februari 1997. Di sisi lain, Jenderal Ne Win melakukan kunjungan ke Indonesia pada 11-14 Juni 1973 dan pada 8- 13 Juni 1974. Jenderal Ne Win juga melakukan kunjungan pribadi ke Indonesia pada 23-25 ​​September 1997 atas undangan Presiden Soeharto. Sementara itu, Jenderal Senior Than Shwe juga melakukan kunjungan ke Indonesia pada 5-8 Juni 1995, November 1996, dan pada bulan April 2005. Indikasi lain dari peningkatan hubungan Indonesia-Myanmar adalah kunjungan tiga Presiden Indonesia ke Myanmar: Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 7 November 1999, Presiden Megawati Soekarnoputri pada 24 Agustus 2001, dan Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1-2 Maret 2006. Perdana Menteri Myanmar Jenderal Thein Sein melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tanggal 16-17 Maret 2009.[[64]](#footnote-65)

Hubungan antara Indonesia dan Myanmar telah tumbuh secara signifikan sejak Myanmar menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997. Indonesia sendiri adalah salah satu dari negara-negara anggota ASEAN yang mendukung masuknya Myanmar ke ASEAN.Indonesia juga mendukung proses demokratisasi Myanmar. Selama kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hubungan bilateral Indonesia-Myanmar telah memasuki fajar baru ketika N. Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan U Nyan Win, Menteri Luar Negeri Uni Myanmar, menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MOU) Kerjasama Bilateral Antara Myanmar dan Indonesia pada tanggal 1 Maret 2006 di Yangon. MOU telah memungkinkan Indonesia dan Myanmar untuk meningkatkan kerjasama bilateral di semua sektor. Pertemuan pertama Komisi Bersama diadakan di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 14-15 Februari 2007. Pertemuan tersebut telah menghasilkan "*Agreed Minutes*" yang berisi rincian dari perjanjian kerja sama di sektor pertahanan dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, energi dan pertambangan, kehutanan, pertanian, perikanan, transportasi, pendidikan dan pelatihan, dan pariwisata. Pertemuan kedua dijadwalkan akan diselenggarakan pada tahun 2008, namun sejauh ini tidak ada konfirmasi tanggal. Indonesia juga telah memberikan kontribusi dalam pembentukan Tripartit Inti Group (TCG) untuk membantu korban topan Nargis yang melanda Ayeyawaddy Delta pada tanggal 2 Mei tahun 2008.[[65]](#footnote-66)

Hubungan Ekonomi antara Indonesia-Myanmar juga memliki nilai, hambatan dan peluang perdagangan Indonesia-Myanmar antara lain:

**1.** Menurut data, produk ekspor Indonesia ke Myanmar a.l. meliputi kertas dan produk kertas, minyak kelapa sawit, besi dan baja, tembakau dan karet (2007: US$ 262.39 juta. Per Juni 2008 sebesar US$140.13 Juta, meningkat sebesar 13,79% untuk periode yang sama di tahun 2007, meskipun ekspor Migas mengalami penurunan). Sementara impor Indonesia dari Myanmar a.l. tepung maizena, kayu gelondongan, kacang-kacangan, soda, ikan dan sayur-sayuran (2007: US$ 30,39 juta, per Juni 2008 sebesar US$ 19.64 Juta). Myanmar mengindikasikan keinginannya untuk mengimpor pupuk atau semen dan mengundang investor Indonesia untuk menanamkan modalnya atau membuka usahanya di Myanmar.

**2.** Total nilai perdagangan RI-Myanmar pada tahun 2008 (per Juni) sebesar US$ 159,7621 Juta meningkat sebesar 9,61% dibandingkan periode yang sama tahun 2007 (sebesar US$ 145,750 juta). Dilihat dari neraca perdagangan, nilai transaksi antara Indonesia dan Myanmar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dan Indonesia masih memperoleh surplus dari neraca perdagangan, di mana tingkat ekspor Indonesia ke Myanmar dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dan tingkat Impor Indonesia dari Myanmar juga menunjukkan kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Myanmar.

**3.** Beberapa hambatan perdagangan antara Indonesia dan Myanmar kedua negara yang selama ini mengemuka antara lain :

**a.** Produk ekspor kedua negara memiliki kemiripan seperti semen, kayu, hasil tambang, mineral, dan produk pertanian, sehingga mempersulit dalam meningkatkan perdagangan. Negara-negara pesaing terutama negara-negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar memiliki advantage yang lebih besar dibanding Indonesia dengan rendahnya ongkos angkut dan kesinambungan pasokan barang mengingat jarak yang lebih dekat ke Myanmar. Belum adanya transportasi langsung Indonesia

**b.** Myanmar antara lain mengakibatkan mahalnya ongkos angkut langsung dari Indonesia. Jumlah importir besar Myanmar pada umumnya menginginkan impor berbagai macam barang dalam berbagai peti kemas. Hal ini belum bisa diwadahi oleh para pengusaha Indonesia mengingat kecilnya jumlah permintaan. Sulit bagi pengusaha swasta Indonesia untuk mengadakan kontak langsung dengan para pengusaha Myanmar guna menawarkan barang-barang komoditi ekspornya, karena kegiatan perdagangan di Myanmar dilakukan oleh pemerintahnya. Kesulitan yang dialami Pemerintah Myanmar untuk mengadakan pembelian barang-barang yang diperlukannya di pasar bebas karena devisa untuk barang impor pada umumnya berupa bantuan dan pinjaman dari negara-negara asing seperti Jepang, Jerman, dan badan-badan Internasional lainnya. Pinjaman-pinjaman tersebut pada umumnya harus dibelanjakan di negara-negara donor tersebut. Pemerintah Myanmar hingga kini masih menerapkan sistem lisensi terhadap ekspor dan impor, dan upaya permohonan lisensi ekspor dan impor para pengusaha ditolak oleh Pemerintah dengan tanpa penjelasan penuh. Monopoli ekspor komoditi ini diberikan kepada badan usaha milik negara, di bawah Kementrian Perdagangan.

**4.** Disamping hambatan-hambatan tersebut di atas, terdapat beberapa peluang perdagangan kedua negara antara lain :

**a.** Beberapa komoditi yang ditawarkan Myanmar seperti komoditi pertanian, disamping beras dan kacang kedelai, antara lain chili, onion, pulses, dan beans dengan harga yang kompetitif dan kualitas terjamin serta metode pembayaran yang dapat dirundingkan merupakan peluang baik bagi pengusaha Indonesia khususnya;

**b.** Sebagai sesama negara ASEAN dan hubungan yang baik kedua negara sejak awal kemerdekaan merupakan peluang besar bagi para pengusaha Indonesia melakukan penetrasi pasar bagi produk-produk potensial Indonesia di Myanmar.

Keinginan Myanmar memasok beberapa komoditi dari Indonesia seperti minyak sayur, alat-alat pertanian, garmen, dan semen. Indonesia dapat menawarkan komoditi dan bidang usaha lain yang ditawarkan termasuk peralatan elektronik, semen, pupuk, farmasi, garmen, ban, radiator, tambak ikan/udang, kelapa sawit, kehutanan, dan telekomunikasi.

**c.** Kemungkinan untuk pembuatan naskah Persetujuan Payung (Umbrella Agreement) di bidang kerjasama ekonomi bilateral, yang keduanya secara positif menyambut baik gagasan tersebut.

**d.** Komoditi yang diperdagangkan kedua negara meliputi palawija, ikan dan udang, alat- alat pertanian, barang-barang elektrik dan elektronik, kertas, barang pecah belah, obat-obatan, kosmetik, bahan bangunan, sabun dan bahan makanan.

Salah satu cara yang digunakan untuk menjalin kerjasama perdagangan dengan negara lain adalah melalui kerjasama imbal dagang. Hal ini kiranya juga dapat dimanfaatkan Indonesia dalam mengembangkan kerjasama perdagangan dengan Myanmar.

**e.** Akhir-akhir ini makin banyak produksi Indonesia ditemukan di pasar-pasar di Myanmar, namun barang-barang tersebut dimasukkan ke Myanmar oleh pihak ketiga, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, melalui kerjasama perdagangan dan pengaturan ekspor-impor kedua negara, diharapkan transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung dan dapat meningkatkan volume perdagangan secara signifikan. Selain itu, letak Myanmar yang strategis yang dikelilingi oleh negara-negara yang padat penduduk dan berpotensi ekonomi pasar seperti RRC, India, Bangladesh dan Thailand, dapat dikembangkan jejaring (hub/network) pemasaran komoditi Indonesia.[[66]](#footnote-67)

Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan. Indonesia dan Myanmar belum memiliki perjanjian kerjasama atau MoU di bidang pertahanan. Upaya peningkatan kerjasama pertahan tetap dilakukan oleh Athan RI sesuai dengan arahan dari Mabes TNI dan Bais TNI. Upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan antara lain memperkenalkan produksi strategis binaan Dephan RI kepada personel militer Myanmar seperti PT. PINDAD, PT DI, dan PT PAL, melalui presentasi Athan RI pada berbagai acara pertemuan dengan perwira-perwira Pyithu Tatmadaw seperti acara *Defence Services Attache Corps* (DSAC) *Monthly Meeting* serta menawarkan program *Senior Officer Exchange* Program dan pendidikan di TNI bagi personel militer Myanmar.[[67]](#footnote-68)

Sejarah Kerjasama TNI-Pyithu Tatmadaw.Kerjasama antara TNI dan Tatmadaw sebenarnya telah berlangsung sejak awal kemerdekaan ke dua negara. Hal ini dapat dilihat dari data-data sebagai berikut :

**a.** Tahun 1948 Myanmar mengakui Indonesia secara de facto dan pada 1949 mengirimkan persenjataan sebanyak 5 sorti DC 3 bagi TNI di Aceh yang dilakukan oleh Kolonel (Pum) Kyi Win, Letkol (Pum) Myint Swe, dan U Chit Maung dipihak RI dipimpin oleh Opsir Udara 11 Wiweko.

**b.** Pada awal Desember 1948 pesawat Dakota RI-001 Seulawah dengan awak Kapten Pilot J. Maupin, Kopilot Opsir Udara III Sutardjo Sigit, juru radio Adisumarmo, dan juru mesin Caesselberry bertolak dari Lanud Maguwo-Kutaraja dan pada tanggal 6 Desember 1948 bertolak menuju Kalkuta India untuk melakukan perawatan berkala. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda ke II, Dakota RI-001 Seulawah tidak bisa kembali Indonesia. Myanmar mengijinkan Indonesia untuk mengoperasikan RI 001 Seulawah di Myanmar sebagai perusahaan penerbangan Indonesia. Hasil yang diperoleh dari pengoperasian RI 001 Seulawah digunakan membiayai perjuangan RI melawan agresi Belanda bahkan menambah 2 buah pesawat Dakota dengan nomor registrasi RI-007 dan RI-009.

**c.** Sebagai bentuk rasa persahabatan antara Indonesia khususnya TNI dengan Myanmar, maka Indonesia menghibahkan pesawat Dakota RI-007 ke Myanmar pada tahun 1965. Pesawat ini kemudian dioperasikan AU Myanmar. Pesawat ini sekarang disimpan di musium Tatmadaw.

**d.** Tahun 1994 Delegasi Siswa Sesko ABRI dipimpin Marsma Djatmiko melaksanakan kunjungan ke Myanmar.

**e.** Mengunjungi Indonesia. Dari hasil wawancara diketahui, kunjungan dinilai terlalu singkat untuk mencontoh sistem pendidikan TNI untuk diterapkan di Myanmar dan Direktur Latihan Militer Myanmar berkeinginan mengunjungi RI.

**f.** Pada 17 19 September 1997 delegasi WWLN XXX Lemhannas melaksanakan kunjungan ke Myanmar.

**g.** Pada 13-15 Nopember 1997 Pangab Jenderal Feisal Tanjung berkunjung ke Myanmar.

**h.** Pada TA 1999/2000, TNI menyediakan alokasi 20 personil Tatmadaw untuk mengikuti pendidikan Komando dan 1 orang untuk Pasis Sesko, yang tidak dipenuhi karena kesulitan bahasa.

**i.** Pada akhir 2000 KKLN NDC Myanmar ke Indonesia.

**j.** Pada 30 Oktober 2000 kunjungan Kaster TNI Letjen TNI Agus Widjojo dan Gubernur Lemahanas Letjen TNI Johny Lumintang ke Myanmar.

**k.** Pada Agustus 2001, WWLN KRA XXXIV Lemhanas ke Myanmar dan September 2001, kunjungan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono dengan 4 orang anggota rombongan.

**l.** Pada Desember 2001, kunjungan Kaster TNI Agus Widjojo beserta 6 orang anggota rombongan.

**m.** Pada Pebruari 2002, kunjungan Sekjen Dephan Letien TNI Johny Lumintang, Mayjen Sudrajat, dan Brigjen Djoko Sutrisno.

**n.** Pada Oktober 2002, kunjungab Pasis Susreg XXIX Sesko TNI, 35 orang, pimpinan Marsekal Muda TNI Sudarto.

**o.** Pada tanggal 9 Mei Mei 2008, TNI AU mengirimkan 2 pesawat Hercules untuk membawa bantuan pemerintah Indonesia bagi korban bencana alam Topan nargis.

**p.** Pada tanggal 9 Mei Mei 2008, TNI AU mengirimkan 2 pesawat Hercules untuk membawa bantuan pemerintah Indonesia bagi korban bencana alam Topan nargis.

**q.** Pada tanggal 22 Oktober 2009 TNI AD mengirimkan surat proposal kunjungan untuk Rencana Studi Banding TNI AD ke AB Myanmar (Tatmadaw) pada tanggal 19 s.d 23 Desember 2009, tetapi pada 19 November 2009 Tatmadaw mengirim surat yang menyatakan tidak bisa menerima kunjungan TNI AD karena kegiatan Tatmadaw sangat padat.

Perkembangan hubungan TNI-Pyithu Tatmadaw. Interaksi antara TNI dan Tatmadaw sejak tahun 2002 dapat dikatakan tidak ada lagi, kecuali penempatan Atase pertahanan TNI di Myanmar dan Atase Pertahanan Myanmar di Indonesia.[[68]](#footnote-69)

Hubungan bilateral di bidang penerangan dan sosial budaya antara lain terlihat dari partisipasi Myanmar dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun beasiswa yang ditawarkan oleh Pemerintah RI, juga kegiatan pembangunan kapasitas *(capacity building)* seperti program Kerjasama Teknik Negara Berkembang (KTNB). Luasnya cakupan kerja sama yang dapat diselenggarakan pada bidang ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Myanmar yang cenderung keras untuk bidang politik dan ekonomi, sehingga bidang seni dan sosial budaya yang dapat dikatakan cenderung "harmless" lebih mudah untuk berkembang.[[69]](#footnote-70)

Dalam rangka peningkatan *people-to-people contact,* pergelaran-pergelaran seni budaya Indonesia terus digiatkan. Pada tahun 2009, dimana diperingati 60 tahun hubungan diplomatik RI-Myanmar, berbagai kegiatan seni budaya dilaksanakan sepanjang tahun guna mewarnai peristiwa bersejarah tersebut, seperti pergelaran upacara adat pengantin Sunda, pergelaran sendratari Ramayana, pergelaran upacara turun tanah (tedhak siten), serta penyelenggaraan *"4th Culinary and Culture Fair".* Seluruh kegiatan tersebut memperoleh sambutan yang sangat baik dari masyarakat setempat dan jajaran korps diplomatik di Yangon.[[70]](#footnote-71)

Kemudian pada tanggal 27 Desember 2009 (puncak peringatan 60 tahun hubungan diplomatik), telah diselenggarakan pergelaran budaya bekerja sama dengan National University of Arts and Culture di bawah Kementerian Kebudayaan Uni Myanmar, di National Theatre, Yangon, yang menampilkan pertunjukan budaya dari kedua negara. Pada kesempatan tersebut, sebuah tampilan paduan suara gabungan yang terdiri dari vokalis Indonesia dan Myanmar menyanyikan sebuah lagu ciptaan Sebastianus Sumarsono berjudul "Membangun Persahabatan". Kerja sama yang dilakukan demi terselenggaranya acara peringatan 60 tahun hubungan diplomatik RI-Myanmar tersebut tentunya telah membuka peluang untuk pelaksanaan kerja sama seni budaya lainnya di masa mendatang.[[71]](#footnote-72)

Kesamaan warisan peradaban/budaya agama Buddha yang dimiliki oleh RI dan Myanmar merupakan satu hal istimewa yang dapat menjadikan kedekatan kedua negara lebih dari sekedar 'sahabat', tetapi sebagai 'saudara'. Ini tentunya membuka berbagai peluang kerja sama, terutama di bidang keagamaan, yang dapat dijajaki lebih jauh. Selama ini kerja sama di bidang tersebut telah terlihat dari banyaknya biarawan/biarawati Buddha yang memperdalam ilmu di universitas/institusi Buddhism Myanmar, seperti di Mandalay dan Yangon.

Pada bulan Mei 2009, Duta Besar LBBP RI Sebastianus Sumarsono sempat menghadiri kegiatan *Trail of Civilization* (TOC) di Borobudur. Program TOC yang dilaksanakan secara tahunan merupakan kelanjutan dari Borobudur Declaration yang dideklarasikan oleh 6 (enam) negara yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam, yang memiliki kesamaan warisan budaya agama Buddha.[[72]](#footnote-73)

Selain itu pada bulan November 2009, Dubes RI juga berkesempatan menghadiri acara Puja Relik Buddha di Jakarta, yang mendatangkan relik-relik Buddha dari Myanmar dan Kamboja. Dalam hal ini KBRI turut berperan dalam persiapan acara, melalui fasilitasi yang diberikan kepada panitia penyelenggara dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Myanmar. Dalam pertemuan dengan Menteri Agama Uni Myanmar, beliau menyampaikan harapannya agar kerja sama antara Indonesia dan Myanmar pada bidang keagamaan (khususnya Buddha) tidak terbatas pada penyelenggaraan acara tersebut saja, tetapi juga berlanjut dengan berbagai kerja sama lain di masa depan.[[73]](#footnote-74)

Hubungan erat antara RI-Myanmar juga diwujudkan dalam bidang kemanusiaan, dimana kedua negara saling memberikan perhatian kepada satu sama lain di saat terjadi peristiwa bencana alam dahsyat yang melanda. Saat Myanmar mengalami badai Nargis, Pemerintah RI serta merta berkomitmen untuk memberikan dana bantuan kemanusiaan senilai USD 1 juta. Meskipun penyampaiannya sempat terhambat karena masalah perbankan, namun akhirnya bantuan tersebut dapat diserahkan pada tanggal 31 Agustus 2009 di Nay Pyi Taw. Kemudian ketika terjadi peristiwa gempa bumi yang melanda wilayah Padang, Sumatera Barat, Pemerintah Myanmar pun menunjukkan solidaritasnya dengan menyampaikan sumbangan senilai USD 50 ribu pada tanggal 5 November 2009 di Yangon.[[74]](#footnote-75)

## 5.4. Kerjasama Bilateral Indonesia Vietnam

Hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam diawali dengan pembukaan Konsulat RI di Hanoi pada tanggal 30 Desember 1955, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar RI tanggal 10 Agustus 1964. Pada tahun 1973, kedua negara menormlisasi hubungan dengan menempatkan kembali Duta Besar masing-masing di Jakarta dan Hanoi. Pada bulan Mei 1993 Pemerintah Indonesia membuka Konsulat Jenderal di Ho Chi Minh City. Pada tahun 2003, kedua negara menandatangani Deklarasi Kemitraan Komprehensif Memasuki Abad ke-21. Sejak saat itu, hubungan Indonesia dan Vietnam terus meningkat baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral.[[75]](#footnote-76)

  Pada bulan Juni 2013, Presiden RI dan Presiden Vietnam sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dari kerjasama komprehensif menjadi kemitraan strategis.  Untuk mengimplementasikan kemitraan strategis tersebut, kedua negara juga telah menandatangani *Plan of Action* (PoA) periode 2014-2018, yang memuat rencana aksi berbagai bidang kerjasama yakni politik dan pertahanan keamanan, anti-korupsi, ekonomi dan pembangunan, investasi, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi, energi, informasi dan komunikasi, IPTEK, pendidkan dan kebudayaan, kesehatan, pengembangan SDM dan kesejahteraan sosial,  kerjasama teknis dan kerjasama kekonsuleran serta memperkuat kerjasama, koordinasi dan saling dukung di fora regional dan internasional. Kedua negara juga telah sepakat untuk meningkatkan target nilai perdagangan Indonesia-Vietnam dari US$ 5 milyar pada tahun 2015 menjadi US$ 10 milyar pada tahun 2018.[[76]](#footnote-77)

  Hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara meningkat pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2008 total nilai perdagangan sebesar US$ 2,522 miliar, meningkat US$ 62,76 juta dibanding tahun 2007 dan tahun 2009 tercatat US$ 2,184 miliar, turun sebesar US$ 338 juta akibat dampak krisis ekonomi global. Pada tahun 2010 total nilai perdagangan mencapai US$ 3,342 miliar, pada tahun 2011 menjadi US$ 4,605 miliar, dan tahun 2012 meningkat hingga US$ 4,86 dimana ekspor Indonesia mencapai US$ 2,27 miliar. Sementara pada tahun 2013 volume perdagangan kedua negara mencapai US$ 4,828 miliar. Di bidang investasi, Indonesia menduduki urutan ke-26 pada daftar negara investor di Vietnam dengan 38 proyek senilai US$ 320,52 juta (nilai investasi yang telah terealisasi mencapai US$ 144,07 juta).   Komoditi ekspor utama Indonesia ke Vietnam antara lain: kertas, bahan-bahan kimia, mesin, suku cadang, serat (fiber), komponen listrik, komponen motor, pakan hewan. Sedangkan komoditi impor utama Indonesia dari Vietnam antara lain: beras, tekstil, kopi, alas kaki (*footwear*), sayuran, karet.[[77]](#footnote-78)

## 6. Kondisi Pendidikan Laos

Sebagai negara berkembang di Asia tenggara diperintah oleh pemerintah komunis, [Laos](http://borgenproject.org/poverty-in-laos/) memiliki sistem pendidikan yang sangat terbatas. Negara ini dihuni oleh beberapa kelompok etnis tetapi hanya Lao Loum , atau "dataran rendah Lao", memiliki tradisi pendidikan formal. Sekolah kuil Buddha disebut sekolah wat  adalah sumber utama dari pendidikan sampai pertengahan abad ke-20 dan topik yang dibahas adalah dasar. Biksu akan mengajar murid mereka aritmatika dasar dan keterampilan membaca serta mata pelajaran sosial dan keagamaan. Pada saat itu, hanya dibolehkan untuk anak laki-laki dan laki-laki memiliki akses ke pendidikan lebih lanjut.[[78]](#footnote-79)

Perancis memiliki pengaruh pada pendidikan Laos selama periode kolonial tetapi, sayangnya, sistem sekuler itu didirikan memiliki sedikit relevansi dengan sebagian besar warga pedesaan. Sebagian besar siswa tidak pernah melebihi studi sekolah menengah, dan beberapa yang tidak harus melakukan perjalanan ke kota-kota besar di Vietnam. Hanya minoritas elit saja yang bisa mencapai studi tingkat universitas biasanya perjalanan panjang ke Prancis untuk melanjutkan pendidikan mereka. Baru-baru ini, Republik Demokratik Rakyat Laos atau LPDR, telah bergeser fokusnya ke arah membangun sistem pendidikan yang akan mendorong pemikiran ideologis yang luas dan memobilisasi potensi dengan tujuan untuk membangun pengembangan baik-bulat di berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi dan budaya dan Laos melihat pendidikan sebagai masa depan bangsa. Laos ingin memperkuat sistem pendidikan nasional dengan meningkatkan kualitas secara keseluruhan, meningkatkan relevansi dan memastikan akses yang adil.[[79]](#footnote-80)

Selama periode kolonial, [Perancis](https://en.wikipedia.org/wiki/France) membentuk sistem pendidikan sekuler berpola seperti sekolah di Perancis, dan bahasa Perancis adalah bahasa pengantar setelah kelas kedua atau ketiga. Sistem ini adalah sangat tidak relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup sebagian besar penduduk pedesaan, meskipun ekstensi untuk beberapa pusat kabupaten dan beberapa desa. Namun, hal itu menghasilkan elit kecil ditarik terutama dari keluarga kerajaan dan rumah tangga yang mulia. Banyak anak dari [Vietnam](https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam) imigran Laos yang terdiri sebagian besar kolonial sipil mengikuti sekolah ini. Pada kenyataannya, hal tersebut merupakan proporsi yang signifikan dari siswa di tingkat menengah di pusat-pusat kota. Pendidikan pasca sekolah menengah tidak tersedia di Laos, dan beberapa siswa melanjutkan pendidikan beberapa tempat yang berlokasi di negara tetangga yakni ke [Hanoi](https://en.wikipedia.org/wiki/Hanoi), [Danang](https://en.wikipedia.org/wiki/Danang),Dan[hué](https://en.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9),Vietnam dan [Phnom Penh](https://en.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh), [Kamboja](https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia) untuk pelatihan khusus. Lebih sedikit lagi dilanjutkan dengan studi tingkat universitas di Perancis. *Pathet Lao* mulai memberikan instruksi bahasa Lao di sekolah-sekolah di bawah kontrol di akhir 1950-an, dan kurikulum Laos mulai dikembangkan pada akhir 1960-an di sekolah RLG (*Royal Lao Government*). Pada tahun 1970 sekitar sepertiga dari karyawan sipil dari RLG adalah guru, meskipun mayoritas dari mereka dibayar sangat sedikit dan minimal pelatihan untuk tujuan menjadi guru SD. Pada saat itu, ada sekitar 200.000 siswa SD yang terdaftar di sekolah RLG, sekitar 36 persen dari populasi anak usia sekolah.[[80]](#footnote-81)

Pendidikan sejak tahun pada 1975 memiliki tujuan penting dari [Republik Demokratik Rakyat pemerintah Laos](https://en.wikipedia.org/wiki/Lao_People%27s_Democratic_Republic)  adalah untuk membangun sistem universal. [Pendidikan dasar](https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_education) pada tahun 1985 mengambil alih pengaruh dari [Kerajaan Laos. Sistem pendidikan](https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Lao_Government) yang telah didirikan oleh pemerintah pada tahun 1950 dan direstrukturisasi, menghadapi banyak masalah yang sama yang telah dihadapi pemerintahan sebelumnya. Sistem pendidikan Prancis diganti dengan kurikulum Laos, meskipun kurangnya bahan ajar telah menghambat instruksi yang efektif. Sebuah kampanye keaksaraan untuk orang dewasa secara intensif dimulai pada tahun 1983-1984, untuk memobilisasi orang berpendidikan yang tinggal di [desa-desa](https://en.wikipedia.org/wiki/Village) dan lingkungan [perkotaan](https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_area)  untuk mengajarkan membaca dan menulis pada tingkat dasar dan keterampilan kepada lebih dari 750.000 orang dewasa. Sebagian besar sebagai hasil dari kampanye ini, orang yang mampu membaca dan menulis telah meningkat menjadi sekitar 44 persen. Menurut [PBB](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations) , pada tahun 1985 orang yang mampu membaca dan menulis diperkirakan mencapai 92 persen pria dan 76 persen wanita usia 15 sampai 45. Karena beberapa bahan bacaan yang tersedia, terutama di daerah pedesaan, banyak orang dewasa yang baru melek kehilangan banyak kemahiran mereka setelah beberapa tahun.[[81]](#footnote-82)

Pendidikan di Laos pasca 1990 memiliki Tantangan pembangunan dalam sistem pendidikan Laos Lao populasi 4,9 juta adalah etnis dan bahasa yang berbeda. Pemerintah telah ditetapkan 49 kelompok etnis, banyak memiliki bahasa mereka sendiri. Kehadiran sekolah, buta huruf, dan indikator lain dari pencapaian pendidikan sangat bervariasi di antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Data sensus dari tahun 1995 mengungkapkan bahwa 23 persen dari Lao tidak pernah pergi ke sekolah dibandingkan dengan 34, 56, dan 67 persen untuk Phutai, Khmu, dan Hmong. Di antara dua kelompok etnis terkecil, 94 persen dari Kor dan 96 persen dari Musir pernah bersekolah. Kualitas instruksi cenderung menjadi miskin, dan hampir setengah dari mereka yang masuk tidak menyelesaikan siklus primer.[[82]](#footnote-83)

Lao sebagai bahasa resmi dan instruksional, adalah bahasa pertama sekitar 50 persen dari populasi. Sejak dari awal di mana Lao tidak diucapkan oleh masyarakat di sekolah karna menjadi hambatan yang cukup signifikan dan kondisi sebagian akuntansi untuk tingkat putus sekolah yang tinggi. Mengubah bahasa pengantar akan menjadi masalah yang kompleks. Namun, langkah-langkah dapat diambil oleh sekolah untuk membantu murid non-Lao untuk berbicara. Kualitas pedesaan Laos berimplikasi pada penyediaan pendidikan sebagaimana arus urbanisasi memepermudah penyampaian pendidikan. Hal itu ternyata lebih mahal dari menyediakan sekolah untuk setiap desa kecil daripada membangun sebagian kecil sekolah di kota besar. Perbedaan desa-kota bahkan lebih signifikan dalam penyediaan sekolah menengah, teknik atau kejuruan yang lebih memakan biaya lebih tinggi. Kuantitas dan kualitas pendidikan dipengaruhi oleh struktur demografi dan sangat sensitif terhadap ukuran kelompok usia sekolah. Populasi sangat kelompok muda Laos menempatkan beban berat pada sekolah dan pada saat yang sama, tinggi [rasio ketergantungan](https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_ratio) berkontribusi terhadap produktivitas nasional rendah. Sebagian besar keluarga mendorong anak-anak untuk pergi ke sekolah, dan cenderung untuk mendahulukan laki-laki dibanding perempuan dan secara tidak langsung mengurangi jumlah peluang berikutnya untuk anak perempuan di bidang pendidikan dan di pasar tenaga kerja. Sistem pendidikan berkembang di bawah kondisi parah menghambat guru tidak cukup siap dan dengan bayaran yang tidak layak, dana tidak mencukupi, kekurangan fasilitas, dan alokasi sering tidak efektif dari sumber daya yang terbatas yang tersedia. Secara signifikan dari segi geografis, etnis, gender dan kesenjangan kekayaan dalam distribusi pelayanan pendidikan, dan kesenjangan yang ada pada setiap tingkat sistem.[[83]](#footnote-84)

Pada Pasal 19 Konstitusi Laos yang menyatakan bahwa "pendidikan, budaya, dan ilmiah kegiatan merupakan sarana untuk meningkatkan tingkat pengetahuan, patriotisme, cinta demokrasi rakyat, semangat solidaritas antara kelompok etnis, dan semangat kemerdekaan. Dalam Pasal 22, Konstitusi menegaskan bahwa Negara dan masyarakat akan berusaha untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional, untuk menciptakan peluang dan kondisi yang menguntungkan bagi semua orang untuk menerima pendidikan, khususnya penduduk terpencil dan daerah terpencil, etnis minoritas, perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang kurang beruntung. Keputusan tentang Wajib Pendidikan Dasar 1996 merupakan tonggak sejarah dalam usaha ini dengan membuat pendidikan dasar gratis dan wajib untuk semua anak-anak apakah dengan lembaga-lembaga publik atau swasta. Semua sekolah mandat untuk mematuhi kurikulum nasional, sehingga standardisasi persyaratan minimum pendidikan untuk semua sekolah. Program nasional saat ini terdiri dari sekolah dasar di mana siswa belajar selama lima tahun dan kemudian dapat beralih ke dua periode sekunder pendidikan empat tahun di bawah tahun sekunder dan tiga di atas sekunder. Meskipun anak perempuan diizinkan untuk menghadiri sekolah dasar dan menengah, mereka masih kurang terwakili bersama dengan budaya dan bahasa minoritas. Hal ini tercermin dalam tingkat melek huruf Lao, di mana 86 persen dari perempuan antara usia 15 dan 24 tahun disurvei untuk menjadi melek di 2011, sedangkan 92 persen laki-laki dari kelompok usia yang sama dikonfirmasi untuk menjadi melek.[[84]](#footnote-85)

Undang-undang Pendidikan diberlakukan pada tahun 2000 dan diubah pada tahun 2007 menegaskan kembali klaim yang dibuat dalam Konstitusi Laos bahwa "semua warga Lao memiliki hak untuk pendidikan tanpa diskriminasi" dan menetapkan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk memperluas pendidikan untuk "pengembangan pengetahuan yang diperlukan warga Laos dan kapasitas untuk pekerjaan mereka atau studi lebih lanjut." Meskipun pendidikan di Laos masih belum seperti yang ada di negara-negara maju, jelas bahwa pemerintah LPDR memprioritaskan peningkatan pendidikan sebagai sarana baik modernisasi negara dan menjaga masa depan rakyatnya. Ia mengerti bahwa pendidikan merupakan sarana penting pembangunan nasional dan telah sangat diinvestasikan kepentingannya dalam pendidikan memperluas untuk mencapai tujuan itu.[[85]](#footnote-86)

Laos memiliki 5-4-3 struktur pendidikan formal yang telah ada sejak tahun 2010. Sekolah Dasar memiliki usia masuk resmi enam dan durasi lima kelas. Sekolah menengah dibagi menjadi dua siklus: menengah terdiri dari kelas 6-9, dan menengah atas terdiri dari nilai 10-12. Pendidikan dasar terdiri dari pendidikan dasar dan menengah pertama. Pada prinsipnya, sekolah dasar gratis dan wajib.Siswa mengikuti ujian prestasi utama pada akhir kelas 5, yang lebih rendah pemeriksaan prestasi sekunder pada akhir kelas 9, dan pemeriksaan prestasi menengah atas di akhir kelas 12. durasi tahun ajaran adalah 33 minggu. (UNESCO IBE, Data Dunia tentang Pendidikan. Revisi 6/2012). `Sebelum tahun akademik 2010, menengah dan menengah atas masing-masing berlangsung selama tiga tahun. Di bawah sistem saat ini, satu tahun tambahan telah ditambahkan untuk pada tingkat menengah.[[86]](#footnote-87)

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Jauh Republik Demokratik Rakyat Laos* (Vientiane: KBRI Vientiane, 2015), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*., hlm. 5. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*., hlm 6. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*., hlm 7. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*., hlm 8. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
26. <https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_anggota_Perserikatan_Bangsa-Bangsa>. Di akses tanggal 6 September 2016. [↑](#footnote-ref-27)
27. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa>. Di akses tanggal 6 September 2016. [↑](#footnote-ref-28)
28. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara>. Di akses tanggal 6 September 2016. [↑](#footnote-ref-29)
29. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa>. Di akses tanggal 6 September 2016. [↑](#footnote-ref-30)
30. <https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang_terkurung_daratan>. Di akses tanggal 6 September 2016. [↑](#footnote-ref-31)
31. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44299&Cr=landlock&Cr1#.V87qsluLRH2>. Di akses tanggal 6 September 2016. [↑](#footnote-ref-32)
32. <https://www.asean2016.gov.la/index.php?r=site/newsDetail&page=37>. Di akses tanggal 6 September 2016. [↑](#footnote-ref-33)
33. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara>. Di akses tanggal 6 September 2016. [↑](#footnote-ref-34)
34. <http://aeccenter.kemendag.go.id/peluang-produk-jasa-indonesia/internal-asean/laos/>. Di akses tanggal 8 September 2016. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)
37. <http://www.dw.com/id/ktt-asean-di-laos/a-2951492>. Di akses tanggal 8 September 2016. [↑](#footnote-ref-38)
38. <https://www.asean2016.gov.la/index.php?r=site/newsDetail&page=37>. Di akses tanggal 6 September 2016. [↑](#footnote-ref-39)
39. Andrias Darnayadi, “*KESENJANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA CLMV DAN PENGARUHNYATERHADAP* ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) ***2015****”* , (Bandung , 2015), hlm 2. [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid., hlm 6.* [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid., hlm 7.* [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibd., hlm 5.*  [↑](#footnote-ref-43)
43. <http://www.kemlu.go.id/phnompenh/id/Pages/Kamboja.aspx>. Diakases tanggal 8 September 2016. [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-52)
52. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-53)
53. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-54)
54. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-55)
55. <http://www.kemlu.go.id/vientiane/id/Pages/Laos.aspx>. Diakses Tanggal 8 September 2016. [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-59)
59. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-60)
60. <http://www.kbriyangon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=33>. Diakses tanggal 8 September 2016. [↑](#footnote-ref-61)
61. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-62)
62. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-63)
63. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-64)
64. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-65)
65. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-66)
66. <http://www.kbriyangon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=31>. Di akses tanggl 8 September 2016. [↑](#footnote-ref-67)
67. <http://www.kbriyangon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=30>. Di akses tanggl 8 September 2016. [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-69)
69. <http://www.kbriyangon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=32>. Di akses tanggal 8 September 2016. [↑](#footnote-ref-70)
70. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-71)
71. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-72)
72. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-73)
73. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-74)
74. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-75)
75. <http://www.kemlu.go.id/hanoi/en/Pages/Vietnam.aspx>. Diakses tanggal 8 September 2016. [↑](#footnote-ref-76)
76. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-77)
77. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-78)
78. <http://borgenproject.org/education-laos/>. Diakses tanggal 27 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-79)
79. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-80)
80. <https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Laos>. di akses tanggal 28 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-81)
81. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-82)
82. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-83)
83. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-84)
84. <http://borgenproject.org/education-laos/>. Diakses tanggal 27 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-85)
85. *Ibid.*. [↑](#footnote-ref-86)
86. http://www.epdc.org/country/laos. Diakses tanggal 27 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-87)